

**KINERJA DINAS PERTANIAN DALAM PENYALURAN BANTUAN
BIBIT KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Nadia Turahma

nadyaturrahma@gmail.com

Pembimbing : Abdul Sadad, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The distribution of palm oil seedlings by the Agriculture Service is assistance from the Kuantan Singingi Regent. In the implementation there were problems such as the Decree of the Agriculture Office and the Kuantan Singingi Regent which contained unclear and detailed information, the placement of staff not in the field, the transparency of information on the existence of seed assistance programs by the Agriculture Service, and the coordination and communication of the Agriculture Service with farmer groups that had not run optimally . This study aims to find out and analyze the forms of implementation performance and the factors that hinder the distribution program of palm oil seedlings by the Kuantan Singingi District Agriculture Service. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This method uses the theory of organizational performance from Dwiyanto with performance indicators namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. From the results of this study it was found that the implementation of the distribution of palm oil seedlings was not optimal because there were several factors that inhibited the limited available and insufficient budget to reach the budget for purchasing superior oil palm seeds that had to be channeled, inadequate availability of human resources and the ability to understand and place the position of employees in accordance with their fields in their respective duties and functions as well as outside constraints when the Kuantan Singingi District Agricultural Service conducts the distribution of palm oil seedlings. External factors here are contractors providing palm oil seeds.

Keywords: Assistance, Palm Oil Seeds, Performance, Implementation, Distribution

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ekonomi. Pada dasarnya tujuan pengembangan perkebunan bukan hanya pada sektor meningkatkan produksi saja, akan tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki potensi perkebunan yang melimpah ruah, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten dengan luas areal perkebunan tertinggi di Riau hal ini membuat kepala daerah Kuantan Singingi ingin mensejahterakan masyarakat melalui bidang perkebunan. Kepala daerah Kuantan Singingi mempunyai Visi “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Unggul, Sejahtera, Agamis Dan Harmonis ” dengan salah satu misi yaitu Pengembangan ekonomi kerakyatan dan kemandirian pangan pemerintah membuat suatu program bantuan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kuantan Singingi khususnya dalam bidang perkebunan.

Potensi perkebunan yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi yaitu perkebunan kelapa sawit, karet, kakao dan aneka tanaman lainnya. Tetapi pada saat sekarang ini masyarakat banyak berfokus pada perkebunan kelapa sawit seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan rakyatnya, karena populasi dengan profesi petani 132.822 orang dan luas wilayah perkebunan di kabupaten Kuantan Singingi mencapai 277.571,25 ha. Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi

merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkeimbangan. Dengan demikian pembangunan perkebunan diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, mendorong pengembangan industri hilir serta berperan dalam penyediaan devisa negara.

Kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat dewasa ini sangat memprihatinkan, dimana produktivitas perkebunan rakyat sangat rendah. Rendahnya hasil kelapa sawit disebabkan beberapa faktor antara lain adalah lingkungan yang tidak sesuai, pengetahuan petani tentang teknik budidaya yang tidak baik serta penggunaan bahan tanaman atau bibit yang tidak bermutu. Untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat salah satunya adalah menyediakan bibit kelapa sawit unggul sebagai bahan tanam dalam pembangunan kebun petani yang selama ini menggunakan bibit tidak bermutu. Penggunaan bibit yang tidak bermutu (ilegal) oleh petani disebabkan antara lain :

1. Harga bibit unggul relatif mahal
2. Banyak petani tidak mampu untuk mendapatkan bibit unggul
3. Kurangnya pengetahuan petani tentang bibit unggul
4. Adanya oknum penjual bibit palsu

Sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan terobosan baru dengan membuat suatu gagasan untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat dengan cara penggunaan bibit kelapa sawit unggul dengan menyediakan bibit kelapa sawit unggul. Salah satu program Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi, untuk lima tahun kedepan adalah memberikan dan menyalurkan bantuan bibit kelapa sawit secara gratis kepada masyarakat. Bantuan bibit kelapa sawit disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 107/ V/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.

Dinas Pertanian merupakan penggabungan dari tiga dinas, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan. Peleburan tiga dinas menjadi satu berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 4 tahun 2016. Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh Berbasis Agribisnis, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat". Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Dinas pertanian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian yang mencakup sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Penyaluran bantuan bibit kelapa sawit merupakan salah satu program kerja yang di janjikan oleh bupati terpilih Drs. H. Mursini, M.Si

bersama Wakil Bupati H. Halim, penyaluran bantuan bibit kelapa sawit ini diberikan kepada petani kelapa sawit yang sudah membentuk sebuah kelompok tani sesuai dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 326/XI/2017 Tentang Penetapan Petani Peserta Pada Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Bantuan Bibit Kelapa Sawit) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017. Kelompok tani harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Sudah di bentuk oleh petani dalam suatu rapat pembentukan kelompok tani yang ditandatangani pembentukannya oleh Kepala Desa dan dinyatakan dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani
- b. Mempunyai pengurus kelompok, minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dengan jumlah anggota minimal 10 orang.
- c. Terdaftar di Pemerintah Daerah yang di tetapkan dengan keputusan Bupati Kuantan Singingi.
- d. Telah mengajukan proposal permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani dari Kepala Desa
 2. Daftar Pengurus dan Anggota Kelompok Tani
 3. Sket lokasi lahan
 4. Telah lulus verifikasi saat pelaksanaan CP / CL

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penyaluran bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, penulis

membuat judul “**Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan fenomena pada latar belakang maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja faktor penghambat kinerja Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kinerja Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian di bidang Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang

membahas permasalahan yang sama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun kebijakan dan program penyaluran bantuan bibit kelapa sawit.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, dan memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan ilmu administrasi publik.

2. KONSEP TEORI

2.1 Organisasi

Menurut **Ratnasari (2018)**, organisasi merupakan sekumpulan (*social entities*) yang memiliki suatu tujuan serta dirancang secara sengaja untuk beraktivitas yang dikoordinasikan secara sistematis serta terbuka dan terkait dengan lingkungan *eksternal*.

Menurut **Robins** dalam **Ratnasari (2018)**, organisasi dipandang sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta secara bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus berupaya mencapai suatu sasaran. Ada beberapa unsur penting organisasi yaitu :

1. Kumpulan (entitas sosial)
2. Sistem
3. Koordinasi
4. Kerjasama
5. Tujuan/sasaran

Menurut **Kochler** dalam **Widodo (2018)**, organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu

kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pandangan lain bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlihat secara bersama-sama didalam hubungan yang formal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.2 Kinerja Organisasi

Menurut **Zainal (2015)**, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan yang mana untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Kinerja merupakan cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran, dan penilaian (**Cascio, 2013**).

Menurut **Wibawa** dalam **Hayat (2017)**, kinerja adalah hasil kerja dari suatu individu atau organisasi dibandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai oleh yang bersangkutan, dimana hasil yang dicapai adalah uraian yang dapat ditemukan dalam aturan pembentukan organisasi melalui visi, misi, tujuan, dan strategi yang digunakan dan diharapkan yang ingin dihasilkan

Kinerja organisasi merupakan pencapaian dari suatu lembaga atau instansi pemerintah dalam keberhasilan tujuan yang telah ditargetkan. Menurut **Nasucha** dalam (**Fahmi, 2015**) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah ketercapaian organisasi secara menyeluruh dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai kebutuhan yang berhasil.

Ada beberapa indikator pengukuran kinerja organisasi menurut **Dwiyanto** dalam (**Nofriansyah, 2018**) yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagian rasio antara *input* dengan *output*.
2. Kualitas layanan
Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik
3. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas layanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

2.3 Good Governance

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Menurut **Sadjiono** dalam **Maryam (2016)** *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut **IAN dan BPKP** dalam **Maryam (2016)** yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana

kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi karena penelitian terkait dengan fenomena sosial. Pendekatan Fenomenologi merupakan strategi peneliti di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan untuk lokasi penelitian ini karena di Kuantan Tengah terdapat masalah seperti bibit yang tidak di tanam karena kapasitas lahan yang tidak cukup.

3.3. Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Dinas Pertanian
2. Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Bidang Perkebunan
3. Fungsional Umum Bidang Perkebunan
4. Fungsional Umum Seksi Produksi
5. Fungsional Umum Seksi Perbenihan Dan Perlindungan
6. Kelompok Tani

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa informan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui :

1. Wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data juga didapat dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti data:

1. Profil Kabupaten Kuantan Singingi
2. Undang-Undang dan Surat Keputusan (SK)
3. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5. Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017
6. Buku-buku Bacaan yang berkaitan dengan Penelitian
7. Jurnal yang berkaitan dengan Penyaluran bantuan dan Pelaksanaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik berupa data primer maupun data

skunder sesuai dengan penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap realita yang terjadi pada objek yang kita teliti, istilah sederhananya yaitu proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa sejarah, profil, file, dan foto.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) Analisis data metode interaktif dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat

abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari obeservasi, wawancara dan dokumentasi di analisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Penarikan/Verifikasi

Kesimpulan (*Drawing/ Verification Conclusion*)

Langkah terakhir dalam analisis data dan kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verivikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah di ungkapkan oleh peneliti sejak awal.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Produktivitas

Produktivitas dapat dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output* dari suatu organisasi, dimana *input* dan *output* tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana organisasi telah mencapai produktivitasnya yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan rasio antar *input* dan ouput dalam penelitian ini adalah seberapa besar *input* yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dapat menghasilkan *output* yang maksimal. *Input*nya adalah seperti sumber daya manusia serta anggaran yang dimiliki untuk melakukan setiap tugas dan fungsi dari organisasi, sedangkan *output* yang dimaksud adalah bagaimana penyaluran bantuan bibit kelapa sawit yang dapat terlaksana optimal dan transparan dengan waktu yang efektif dan efisien. Berbicara mengenai *input* yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi *input* Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi saat ini sebenarnya masih kurang memadai, baik dari segi jumlah dan penempatan tugas sumber daya manusia maupun dari segi anggaran operasional yang dimiliki. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah dan penempatan sumber daya manusia serta anggaran yang memadai, sangat menunjang produktivitas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit kepada para petani.

Selain faktor sumber daya manusia, faktor lain yang mempengaruhi *input* dari Dinas Pertanian ialah anggaran. Dalam hal

ini anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi bersumber pada dana APBD Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi anggaran yang disediakan sampai saat ini terbatas dan belum mencukupi untuk menjangkau anggaran pembelian bibit unggul kelapa sawit yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi karena tidak sesuai dengan rancangan anggaran awal. Setelah APBD ditetapkan, anggaran untuk pembelian bibit unggul kelapa sawit dikurangi.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai sejauh mana organisasi publik telah memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat sejauh mana Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi sebagai wahana pelayanan bagi petani telah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan petani sesuai dengan keadaan ekonomi dari petani tersebut.

Petani penerima bantuan harus memiliki Surat Pernyataan bahwa lahan tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dalam sengketa, bersedia menyiapkan lahan (*land clearing*) dan melaksanakan penanaman dengan biaya sendiri. Calon penerima bantuan bibit kelapa sawit juga harus membuat proposal bantuan bibit kelapa sawit sebagai kelengkapan administrasi. Proposal berisi tentang data lahan dan petani masing-masing kelompok tani. Proposal diseleksi selama satu bulan terhitung mulai dari waktu terakhir pengumpulan proposal.

Seperti yang kita ketahui bersama, tidak semua masyarakat yang paham dan pandai dalam pembuatan proposal. Selain itu setelah pembuatan proposal juga belum terjamin lolos seleksi. Hal ini tentu memberatkan masyarakat, yang seharusnya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan bantuan malah menjadi kesulitan karena harus mengurus syarat-syarat yang diminta oleh Dinas Pertanian sebagai kelengkapan administrasi.

Selain itu, tanpa dipungkiri kemudahan akses dan informasi tentang kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi memang salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Termasuk bagaimana supaya masyarakat pun akhirnya dapat mengetahui adanya program bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini tentunya tidak transparan karena informasi yang tersebar tidak merata. Pada saat sosialisasi pun, tim pelaksana hanya mensosialisasikan teknis budidaya bibit aja. Selain itu, pengurangan jumlah bibit, pengecekan ulang lahan dan peninjauan bibit setelah dibagikan oleh tim pelaksana penyaluran bantuan bibit masih belum optimal dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

Selain itu, juga ditemukan anggota kelompok tani yang namanya sudah terdaftar di surat keputusan (SK) penerima bantuan bibit, tetapi tidak mendapatkan bantuan dan hal ini tidak diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelaksana

penyaluran bantuan bibit kelapa sawit.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas layanan dalam mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu dibahas mengenai sejauh mana Dinas Pertanian sebagai pelaksana telah memberikan respon kepada kelompok tani dan apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengarahan banyak dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan kepada tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan, bagaimana proses yang sebenarnya dan yang baik serta pemberian motivasi agar pegawai lebih semangat dalam bekerja. Khususnya dalam kegiatan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit. Pada dasarnya secara operasional sulit membedakan rangkaian kegiatan memajukan dan mengembangkan dalam kegiatan pengarahan dan bimbingan, berikut adalah cara agar pengarahan dan bimbingan tercapai dengan baik :

Pada suatu organisasi ketika melakukan pelaksanaan suatu program sangat penting untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) karena berguna sebagai alat pengukur dan panduan agar kegiatan yang akan dilakukan jelas dan terarah. Dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai berikut:

1. Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap calon lahan

dan calon penerima bantuan bibit kelapa sawit

2. Menyusun Data Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit
3. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit
4. Menyerahkan Bantuan Bibit Kelapa Sawit Sesuai Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit

Dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit kepada petani, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan bantuan berupa bibit kelapa sawit umur >9-18 bulan sebanyak 135 batang/hektar, yang diterima dititik bagi. Titik bagi adalah kantor Kepala Desa masing-masing. Sedangkan pengangkutan bibit dari titik bagi ke lahan petani merupakan tanggung jawab petani peserta yang sebelumnya telah dilakukan serah terima barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya, Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi melakukan koordinasi dan komunikasi internal dan dengan petani calon penerima bantuan bibit kelapa sawit.

Komunikasi dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan mulai dari jabatan paling atas hingga paling bawah. Apabila tujuan serta sasaran dari suatu program tersebut tidak ada kejelasan maka kemungkinan akan adanya kesalahan dalam berbagai hal

sehingga pelaksanaan program tersebut pun tidak terlaksana dengan baik.

Kelancaran dalam berkomunikasi sangat penting dalam menyangkut penyaluran bantuan bibit kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Tengah ini, komunikasi terjadi antara pihak Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dan Kelompok Tani penerima bantuan bibit kelapa sawit.

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan kelompok tani. Komunikasi juga terjalin antara kepala seksi perbenihan dan perlindungan, Komunikasi dilakukan dalam bentuk memberikan dan menjelaskan perintah, bimbingan, nasihat, pengarahan, peringatan dan lain-lain berkenaan dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan.

Dalam proses menginformasikan program bantuan bibit kelapa sawit ini yang berperan sebagai komunikator adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai komunikator, Dinas Pertanian bertugas untuk menginformasikan dan mensosialisasikan program bantuan bibit kelapa sawit kepada masyarakat. Dengan tugas sebagai komunikator Dinas Pertanian membentuk sebuah tim sosialisasi agar dalam menyampaikan informasi lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi juga terjalin antara Staf Dinas Pertanian dengan Kepala Dinas dan Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan selaku jabatan tertinggi dalam program bantuan bibit kelapa sawit, komunikasi

dilakukan dalam bentuk memberikan atau menyampaikan laporan lisan atau tertulis, pendapat, saran-saran, ide/gagasan, kreativitas, inovasi, kritik, keluhan-keluhan dan lain-lain. Tetapi dalam koordinasi antara Dinas Pertanian dengan kelompok tani masih belum optimal.

Oleh sebab itu, para pelaksana program bantuan harus dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Kemudahan koordinasi yang dilakukan melalui sosialisasi memang diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan yang diberikan bagi kelompok tani karena banyak masyarakat yang belum paham bagaimana penanaman bibit yang baik.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat.

Berikut bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian kepada Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa laporan seperti laporan hasil seleksi petani penerima bantuan bibit kelapa sawit, laporan bibit kelapa sawit yang diterima oleh Dinas Pertanian dan laporan hasil penyaluran bantuan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani.

Dinas Pertanian rutin membuat laporan mulai dari tahap awal pelaksanaan hingga tahap bibit disalurkan kepada petani penerima bantuan. Laporan yang menjadi pertanggungjawaban Dinas Pertanian

kepada Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berupa laporan seperti laporan hasil seleksi petani penerima bantuan bibit kelapa sawit, laporan bibit kelapa sawit yang diterima oleh Dinas Pertanian dan laporan hasil penyaluran bantuan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani.

Pelaporan terkait penyaluran bantuan bibit kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi masih belum baik. Pelaporan yang terdiri dari 3 aspek yaitu tepat, benar dan lengkap, Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan pelaporan masih kurang tepat waktu yang disepakati.

4.2 Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat penyaluran bantuan bibit kelapa sawit oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya sebagai berikut:

1. Anggaran

Anggaran atau dana adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Anggaran yang digunakan untuk penyaluran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi anggaran yang disediakan sampai saat ini terbatas dan belum mencukupi untuk menjangkau anggaran pembelian bibit unggul kelapa sawit yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi karena

tidak sesuai dengan rancangan anggaran awal. Setelah APBD ditetapkan, anggaran untuk pembelian bibit unggul kelapa sawit dikurangi.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam penyaluran bantuan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat kedua. Penyaluran bantuan bibit kelapa sawit dapat terwujud dengan optimal apabila ketersediaan sumber daya manusia memadai dan kemampuan pemahaman dan ekonomi yang baik dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi terdapat adanya keterbatasan sumber daya manusia atau petugas pelaksana penyaluran dan masih kurangnya petugas yang benar-benar memahami dan menguasai spesifikasi bibit kelapa sawit yang unggul dan layak ditanam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah dan penempatan SDM yang memadai, sangat menunjang produktivitas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit kepada para petani. Jika jumlah dan penempatan SDM yang memadai belum memadai tentu akan menghambat proses penyaluran baik dari segi waktu maupun dari segi kinerja.

3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini ialah faktor penghambat dari luar pada saat Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit. Faktor eksternal yang menghambat penyaluran bantuan bibit kelapa sawit adalah terdapatnya

bibit kelapa sawit yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam penyaluran bantuan maka bibit kelapa sawit tidak akan diterima dan diganti dengan bibit yang baru.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang penulis lakukan dapat disimpulkan Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
 - a. Dilihat dari produktivitas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi bisa merangkap ketiga tim yang dibentuk dan penempatannya yang tidak pada bidangnya, serta anggaran operasional yang juga belum memadai.
 - b. Kualitas layanan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi juga belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan bibit kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Disamping itu masih terdapat petani yang belum puas terhadap pelayanan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi karena tidak adanya peninjauan kembali ke lapangan.
 - c. Masih kurangnya responsifnya Dinas Pertanian Kabupaten

Kuantan Singingi dalam memenuhi kebutuhan petani serta program sosialisasi yang masih perlu dioptimalkan

- d. Komunikasi dan koordinasi antara tim dengan anggota kelompok tani yang masih belum optimal karena pada saat proses seleksi masih terdapat beberapa kali pergantian peraturan yang membuat petani bingung.
 - e. Dilihat dari segi akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi juga telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana penyaluran bantuan bibit dari Bupati Kuantan Singingi untuk menepati janji kampanye. Tetapi jika dilihat dari sistem pelaksanaan masih belum tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang menghambat Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit
Diantaranya anggaran yang tersedia pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit terbatas dan belum mencukupin untuk anggaran pembelian bibit unggul kelapa sawit yang harus disalurkan. Ketersedian sumber daya manusia belum memadai dan kemampuan pemahaman serta penempatan posisi pegawai sesuai dengan bidangnya dalam tugas dan fungsinya masing-masing serta faktor eksternal seperti bibit kelapa sawit yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi sebelum diserahkan kepada masing-masing kelompok tani yang telah lulus verifikasi lahan dan proposal dalam keadaan rusak sebanyak 40%. Seperti tinggi bibit kelapa sawit yang tidak cukup, umur

bibit yang tidak sesuai karena banyak bibit yang umurnya dibawah 9 bulan dan ada juga bibit yang umurnya diatas 18 bulan, dan banyaknya bibit yang terserang hama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat melaksanakan penyaluran bantuan bibit dengan optimal, yaitu:

1. Dalam mencapai Kinerja Dinas Pertanian Dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang optimal upaya yang perlu dipertimbangkan adalah menambah anggaran untuk penyaluran bantuan bibit kelapa sawit sehingga bantuan bibit dapat tersalurkan dengan tepat waktu. Sedangkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi juga perlu untuk menambah anggaran pengawasan, sehingga dapat melaksanakan peninjauan bibit setelah pembagian untuk memastikan bibit yang disalurkan sudah ditanam, rapat koordinasi, dan penyaluran bantuan bahkan untuk penyediaan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga kinerja Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan bibit dapat berjalan dengan optimal.
2. Upaya kedua yang perlu dipertimbangkan adalah penambahan personil khususnya untuk petugas pelaksana penyaluran yang ahli pada bidang bibit kelapa sawit yang

benar-benar memahami dan menguasai spesifikasi bibit kelapa sawit yang unggul dan layak ditanam. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan terjalannya komunikasi yang baik antara Dinas Pertanian dengan kontraktor penyedia bibit agar dapat menanggulangi faktor eksternal dan bibit dapat datang tepat waktu dengan kondisi yang baik, sehingga kinerja Dinas Pertanian dalam penyaluran bantuan bibit dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Emzir. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers.
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2017). *Manajemen Kepemimpinan Teori & aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hery. (2018). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen*

Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish.

Ratnasari, R. T. (2017). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)*. Yogyakarta: Gosyen publishing.

Ratnasari, R. T. (2018). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)*. Yogyakarta: Gosyen publishing.

Ruliana, P. (2016). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sinambela, L. P. (2016). *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryani, N. K. dan FoEh, J. E. H. J. (2018). *Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, S. E. (2018). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainal, V. R. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Aditama, P. B. dan Widowati, N. (2016). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. *Nucleic Acids Research*, 34(11), 77–77.

Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu*

Politik dan Komunikasi, Vol. 6 No. 1, 1-18.

Dokumen

1. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 107/ V/ 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit

2. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 1026 Tahun 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Sosialisasi Kegiatan Bantuan Bibit Kelapa Sawit Anggaran 2017

3. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 566 Tahun 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pemantapan Lahan Kegiatan Bantuan Bibit Kelapa Sawit Anggaran 2017

4. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 942 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tim Evaluasi Kesiapan Lahan Kegiatan Bantuan Bibit Kelapa Sawit Anggaran 2017

5. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 326/ XI/ 2017 Tentang Penetapan Petani Pesereta Pada Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017

6. Standar Operasional Prosedur

7. Hasil Wawancara

8. Dokumentasi